

Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama

Conflict Resolution of Teluk Cenderawasih National Park Management in Teluk Wondama Regency

Edward Sembiring^{1*}, Sambas Basuni², dan Rinekso Soekmadi²

¹Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor

²Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

Abstract

Conflicts of interest have occurred in the management of the area and natural resources of Teluk Cenderawasih National Park (TNTC) in Teluk Wondama Regency, West Papua Province. The implications of the park zoning system resulted in pro-and-contra situations that might create conflicts. With this context, the research aimed to formulate-resolution concepts that were considered suitable to resolve the conflicts for managing the park. The research showed that most stakeholders can be mapped out as key players and subject of conflict, just one as crowd and ones as context setter. The research also revealed that the zoning system has accommodated the needs and aspirations of all stakeholder. Based on the finding it can be said that the existing conflict models were categorized as no conflict among most stakeholders, latent conflict (between BBTNTC with WWF, BBTNTC with Dinpar, DKP with Waprak, and DKP with Yende), and emerging conflict (between DKP with BBTNTC). The research concluded that the conflict of the park management can be resolved through collaborative management approach that can be developed with shared control by other stakeholders. Collaborative management should be implemented as "step by step process": (1) strengthening the capacity of BBTNTC, (2) consolidation of BBTNTC with NGO (WWF) and local government (DKP and Dinpar), and (3) establishment collaboration with local community and the other stakeholders.

Keywords: TNTC, stakeholder, conflict, resolution, collaborative

**Penulis korespondensi, email: edward_phka@yahoo.com*

Pendahuluan

Konflik berkaitan erat dengan kehidupan manusia dan selalu bergerak dari konflik yang satu ke konflik yang lain. Masyarakat yang mulai berkembang akan menempatkan penyelesaian konflik sebagai wacana utama dalam hubungan sosial yang terjadi antarpersonal maupun antarkelompok (Faisal & Siti 2000). Kawasan konservasi berupa taman nasional merupakan salah satu sumber daya alam yang seharusnya dikelola dengan sistem zonasi masih dikelola secara sentralistik sehingga menghadapi berbagai kendala. Wiratno *et al.* (2004) mengemukakan bahwa beberapa kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan anggaran, sumber daya pengelola yang masih belum memadai, kelemahan infrastruktur, dan hubungan yang belum harmonis dengan masyarakat di sekitar kawasan. Penyelesaian konflik dalam pengelolaan taman nasional tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Pendekatan alternatif penyelesaian konflik (APK) muncul sebagai jawaban atas berbagai ketidakpuasan terhadap pendekatan hukum. Pendekatan ini dikembangkan untuk menghindari model pihak pemenang dan pihak yang kalah yang dihasilkan oleh pendekatan hukum (Mitchell 2000).

Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) merupakan taman nasional laut terluas di Indonesia

(1.453.500 ha). Kawasan ini terletak di 2 daerah administratif yaitu di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (30,98% area) dan di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat (69,02%). Kabupaten Teluk Wondama merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002 (BBTNTC *et al.* 2009). Guna mengetahui apakah penetapan zonasi TNTC merupakan salah satu APK, perlu dilakukan kajian ilmiah dengan melihat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap zonasi serta kebutuhan dan aspirasinya sebagai pertimbangan dalam merumuskan konsep resolusi konflik

Kawasan TNTC dibagi atas 6 zona yaitu zona inti, zona perlindungan bahari/rimba, zona pariwisata, zona tradisional, zona umum, dan zona khusus (BBTNTC *et al.* 2009). Penetapan zonasi TNTC telah membatasi ruang gerak nelayan tradisional khususnya di zona inti yang merupakan "zona tabungan". Hal ini menimbulkan konflik karena justru di zona inti terdapat hasil laut yang melimpah. Fenomena lain adalah, Pemda c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Teluk Wondama pernah mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk menangkap hasil laut di dalam kawasan tanpa ada koordinasi (BBTNTC 2008). Kondisi ini sesuai dengan yang dikemukakan Adiwibowo *et al.* (2009) bahwa ancaman terbesar terhadap keutuhan dan kelestarian

kawasan konservasi sesungguhnya berada pada institusi pemerintah, baik pada aras pusat maupun daerah otonom. Fenomena tersebut terakumulasi dan cenderung menyebabkan terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam pada kawasan. Oleh sebab itu diperlukan jaringan kerja dan komitmen bersama para pihak yang berkepentingan di dalam kawasan taman nasional.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merumuskan konsep resolusi konflik yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat TNTC bagi seluruh *stakeholders*. Adapun tujuan spesifik adalah mengidentifikasi dan memetakan *stakeholders* yang terlibat dalam proses penetapan zonasi serta menganalisis kepentingan dan pengaruhnya terhadap pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama, menganalisis kebutuhan dan aspirasi *stakeholders* dalam implementasi zonasi, menganalisis bentuk-bentuk dan level konflik yang terjadi, serta merumuskan konsep resolusi konflik pengelolaan TNTC.

Metode

Penelitian dilakukan di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat pada periode Agustus 2009–April 2010. Teknik pengambilan contoh diawali dengan *purposive sampling* dan selanjutnya dilakukan dengan teknik *snow ball sampling*. Wawancara dilakukan dengan *indepth interview* menggunakan metode *semi-directive interview* (Huntington 1998). Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang lokasi, keadaan lingkungan kawasan, dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan zonasi taman nasional. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, penelusuran internet, penelusuran dokumen zonasi, kajian terhadap literatur, peraturan perundangan, dan data pendukung lainnya.

Jenis, teknik pengumpulan, dan analisis data primer, serta keluaran yang diharapkan dalam penelitian disajikan pada Tabel 1. Data yang diamati adalah tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap zonasi, kebutuhan, dan aspirasi *stakeholders* tentang zonasi, dan berbagai bentuk dan level konflik yang terjadi dalam pengelolaan TNTC. Analisis *stakeholders* dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam sistem zonasi TNTC dengan menggunakan *stakeholders grid*. Analisis kebutuhan dikelompokkan menurut kemiripannya berdasarkan kebutuhan sinergis dan tidak sinergis masing-masing *stakeholder* (jika kebutuhan dan aspirasi antar*stakeholder* saling mendukung zonasi, kebutuhan dianggap sinergis, dan sebaliknya). Data konflik berdasarkan level permasalahan dikelompokkan ke dalam konflik vertikal dan konflik horizontal, sedangkan bentuk dan level konflik dianalisis dengan mengelompokkan data kebutuhan dan aspirasi yang tidak sinergis ke dalam bentuk konflik berdasarkan Fisher (2001):

- 1 Konflik tertutup (*latent*) jika ada tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik dan seringkali salah satu

atau kedua belah pihak belum menyadari adanya konflik.

- 2 Konflik mencuat (*emerging*) jika pihak-pihak yang berselisih telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas dan proses penyelesaian masalah belum berkembang.
- 3 Konflik terbuka (*manifest*) jika pihak-pihak yang berselisih terlibat aktif dalam perselisihan, mungkin sudah mulai bernegosiasi dan mungkin telah mencapai jalan buntu.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholders* Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders* dapat berubah sepanjang waktu, dampak perubahan tersebut perlu dipertimbangkan (Mark *et al.* 2009). *Stakeholders* yang berada pada posisi *key stakeholder* harus diperhatikan dan diurus karena mereka mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap fenomena pemanfaatan ruang. Jika posisinya sebagai *subject* maka perlu pemberdayaan terhadap *stakeholders* tersebut. Jika tidak diberdayakan, besar kemungkinan mereka melakukan perlawanan dengan membentuk aliansi dan pada saatnya akan berada pada *key stakeholder* tetapi terjadi konflik dalam proses tersebut. Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders* disajikan pada Gambar 1.

Kebutuhan dan aspirasi *stakeholders* Secara umum diketahui bahwa kebutuhan *stakeholders* (Tabel 2) mendukung zonasi yang ada, kecuali DKP Teluk Wondama. DKP Teluk Wondama menganggap zonasi TNTC sangat penting, tetapi karena proses penetapannya tidak melibatkan mereka maka saat ini akan dibuat perda tentang Zonasi KP3K sebagai tandingan terhadap zonasi TNTC. Daftar kebutuhan *stakeholder* pada Tabel 2 merupakan kebutuhan terkait dengan zonasi TNTC yang telah ditetapkan.

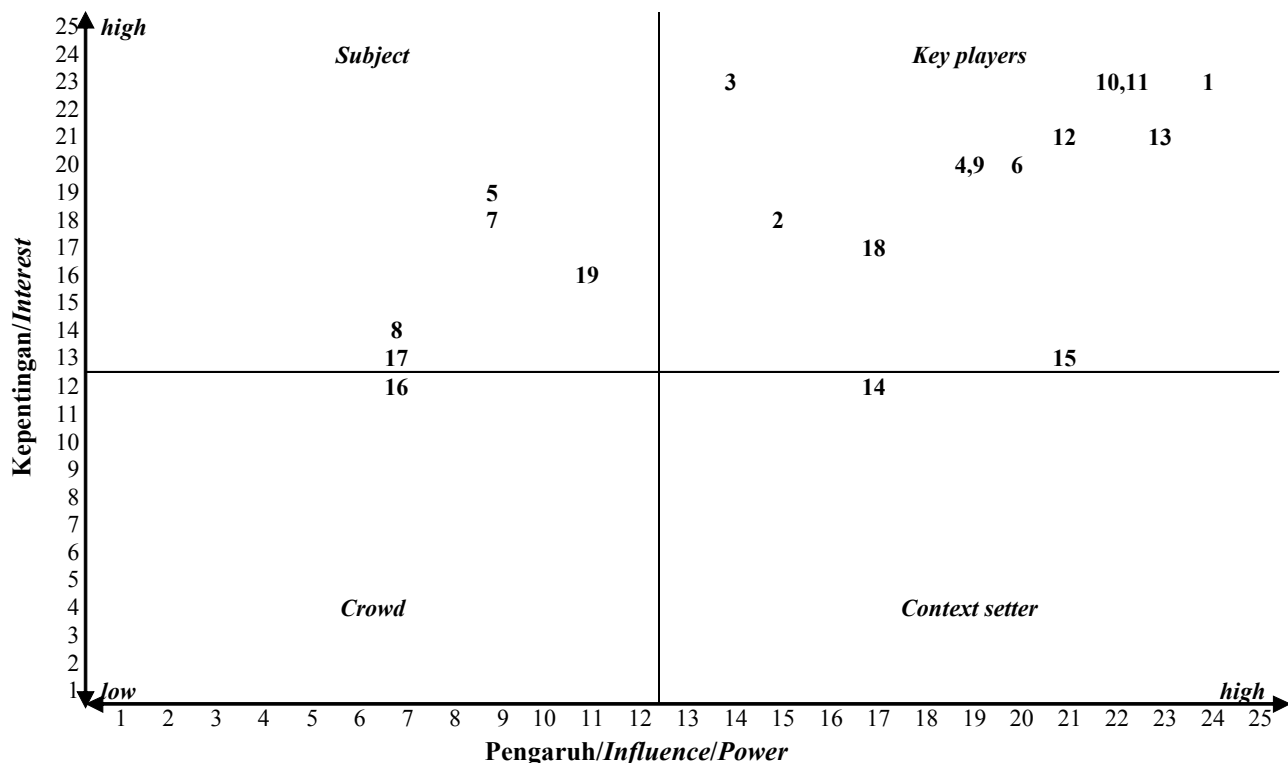
Kebutuhan sinergis *stakeholders* adalah pembentukan Forum Kolaborasi, pembukaan “Tikar Adat” pada masing-masing distrik untuk sinkronisasi hak kepemilikan lahan dalam pemanfaatan ruang, penataan batas zona inti TNTC, pemanfaatan zonasi sesuai peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dengan sendirinya mereka juga akan menjaga kawasan, penyuluhan dan sosialisasi zonasi secara terus menerus oleh setiap petugas (BBTNTC, Pemda, maupun LSM) ketika ke lapangan. Adapun kebutuhan tidak sinergis meliputi pemberian SIUP dan SIPI kepada pengusaha dengan mengabaikan *stakeholders* terkait lainnya, pemberian SIMAKSI bagi setiap orang yang beraktivitas di dalam kawasan termasuk pemegang SIUP dan SIPI, *MoU* antara BBTNTC dan WWF pada tingkat lokal, rancangan perda tentang Zonasi KP3K dijadikan sebagai tandingan oleh DKP Teluk Wondama terhadap zonasi TNTC yang ada, penyusunan RIPPDA Kabupaten Teluk Wondama.

Berbagai bentuk dan level konflik Peta konflik pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama disajikan

Tabel 1 Jenis, teknik pengumpulan, dan analisis data, serta keluaran yang diharapkan dalam penelitian

Tujuan penelitian	Jenis data yang dibutuhkan	Teknik pengumpulan data	Teknik analisis data	Keluaran yang diharapkan
Menganalisis kepentingan dan pengaruh <i>stakeholders</i>	Kepentingan dan pengaruh masyarakat lokal, LSM, swasta, BBTNTC, DKP, BAPPEDA, Dinpar	Wawancara (metode <i>semi directive interview</i>)	Analisis <i>stakeholders</i> (analisis kepentingan dan pengaruh)	Kepentingan dan pengaruh <i>stakeholders</i> terkait zonasi TNTC
Menganalisis kebutuhan dan aspirasi <i>stakeholders</i>	1 Kebutuhan <i>stakeholders</i> 2 Aspirasi <i>stakeholders</i> tentang implementasi zonasi	Wawancara (metode <i>semi directive interview</i>)	Analisis deskriptif	Kebutuhan dan aspirasi <i>stakeholders</i> tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan dampak zonasi
Menganalisis bentuk-bentuk konflik	Kebutuhan <i>stakeholders</i> yang tidak sinergis	Wawancara mendalam	Analisis deskriptif	Bentuk-bentuk konflik pengelolaan
Merumuskan konsep resolusi konflik	Kebutuhan dan aspirasi <i>stakeholder</i> serta bentuk konflik	Wawancara mendalam	Analisis deskriptif	Konsep resolusi konflik

Sumber data: masyarakat lokal, LSM, swasta, BBTNTC, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), DKP, Dinpar.



1: BBTNTC; 2: Dinpar TW; 3: DKP TW; 4: BAPPEDA TW; 5: Kantor Lingkungan Hidup (KLH) TW; 6: Distrik Roswar; 7: Distrik Wamesa; 8: Kampung Yopanggar; 9: Kampung Yende; 10: Kampung Isenebuay; 11: Tokoh Adat di Isenebuay; 12: Kampung Waprak; 13: WWF Indonesia Site TW; 14: Konsorsium Mitra Bahari; 15: Yayasan Lingkungan Hidup Manokwari (YALHIMO); 16: Pengusaha lokal; 17: Pengusaha dari luar Teluk Wondama; 18: DKP Papua Barat; 19: Dinpar PB.

Gambar 1 Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders*.

pada Gambar 2. Secara umum, konflik pengelolaan TNTC yang terkait dengan zonasi masih berada dalam bentuk *latent* yang dicirikan dengan adanya tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik, dan seringkali salah satu atau kedua belah pihak belum menyadari adanya konflik. Konflik yang mencuat ditemukan antara BBTNTC dan DKP Teluk Wondama yang dicirikan dengan telah teridentifikasinya pihak-pihak yang berselisih, telah diakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, dan proses penyelesaian masalah belum berkembang.

Berdasarkan level permasalahannya, konflik pengelolaan TNTC dibedakan menjadi:

1. Konflik vertikal antara DKP Teluk Wondama dan Kampung Waparak, antara DKP Teluk Wondama dan Kampung Yende, serta antara BBTNTC dengan WWF. Konflik tersebut masih *latent* dan ada kemungkinan akan mencuat bahkan terbuka apabila diabaikan.
2. Konflik horizontal antara BBTNTC dan Dinpar Teluk Wondama, serta antara BBTNTC dan DKP Teluk Wondama. Konflik antara BBTNTC dengan Dinpar Teluk Wondama masih dalam bentuk *latent*, sedangkan

konflik antara BBTNTC dan DKP Teluk Wondama sudah mencuat.

Konsep resolusi konflik pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik hanya terjadi antara *key stakeholders*. Analisis kebutuhan dan aspirasi juga menunjukkan bahwa kebutuhan yang tidak sinergis justru terjadi antara *stakeholders* yang menempati posisi sebagai *key stakeholders* sehingga terjadi konflik di antara mereka. Sebagai kelompok yang paling kritis, *key stakeholders* perlu diurus karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap zonasi TNTC. Prioritas utama dilakukan terhadap *stakeholders* yang mengalami konflik mencuat, kemudian *stakeholders* yang mengalami konflik tertutup. *Stakeholders* yang tidak mengalami konflik tetapi memiliki posisi sebagai *key stakeholders* juga tidak boleh diabaikan karena kondisi yang ada sangat dinamis sehingga tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan mengalami konflik antara satu dengan yang lainnya. *Stakeholders* lain yang belum teridentifikasi dalam penelitian ini mungkin saja ada dan menjadi *stakeholders* kunci. Perubahan tersebut akan sangat tergantung pada seberapa besar kebutuhan dan aspirasi mereka dapat

Tabel 2 Ringkasan kebutuhan *stakeholders*

Kebutuhan	<i>Stakeholders</i>
Tata batas zona inti	BBTNTC, BAPPEDA, Distrik Roswar, Kampung Yende, dan Kampung Waparak
Sosialisasi zonasi ke pemda, kemudian ke masyarakat	BBTNTC, Dinpar Teluk Wondama, Kampung Yopanggar, dan Kampung Yende
Peningkatan ekonomi masyarakat	BBTNTC, Dinpar, Distrik Roswar, Distrik Wamesa, Kampung Yopanggar, Kampung Yende, Kampung Waparak, Kampung Isenebuay, tokoh adat Isenebuay, WWF, dan YALHIMO
Pemberian Surat Ijin Masuk Kawasan (SIMAKSI) bagi setiap orang yang beraktivitas di dalam kawasan termasuk pemegang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Keutuhan kawasan harus dijaga sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA) dan juga potensi hasil laut di Kabupaten Teluk Wondama	BBTNTC Dinpar Teluk Wondama, Kampung Yopanggar, Kampung Yende, Kampung Waparak, Kampung Isenebuay, BBTNTC, WWF, DKP Teluk Wondama, pengusaha lokal, pengusaha luar, DKP Papua Barat, dan Dinpar Papua Barat
Penerimaan PAD sektor pariwisata Pemberian SIUP dan SIPI Peta Zona Inti TNTC sebagai lampiran perizinan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Teluk Wondama Perda tentang Zonasi KP3K	Dinpar Teluk Wondama DKP Teluk Wondama dan pengusaha luar DKP Teluk Wondama Dinpar Teluk Wondama dan BAPPEDA
Buka “Tikar Adat” MoU antara BBTNTC dan WWF Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembentukan Forum Kolaborasi	DKP Teluk Wondama dan BAPPEDA Kab. Teluk Wondama BAPPEDA Kabupaten Teluk Wondama BBTNTC KLH Teluk Wondama Distrik Wamesa, BBTNTC, KMB, WWF, dan BAPPEDA
Aturan adat dan tempat sakral harus dilindungi Peraturan Kampung segera disahkan oleh pemda Siapkan <i>database</i> kawasan	Tokoh adat Isenebuay dan YALHIMO Distrik Roswar dan Kampung Waparak KLH Teluk Wondama dan KMB

Tabel 3 Ringkasan aspirasi *stakeholders*

Aspirasi	Stakeholders
Buka "Tikar Adat"	Kampung Yende dan tokoh adat Isenebuay
WWF perlu ada laporan rutin ke BBTNTC	BBTNTC
Penyuluhan secara rutin kepada masyarakat dengan metode yang lebih menarik menggunakan alat peraga dan mudah dipahami, penempelan peta zonasi pada setiap rumah	BBTNTC, BAPPEDA TW, DKP Teluk Wondama, LSM, Masy, KLH Teluk Wondama, Distrik Roswar, Distrik Wamesa, tokoh adat Isenebuay, Kampung Waparak, WWF, dan YALHIMO
Pengawasan bersama zonasi yang didukung oleh sarana komunikasi radio terpadu dan pembangunan kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah	BBTNTC, BAPPEDA Teluk Wondama, Kampung Yende, KLH Teluk Wondama, Kampung Isenebuay, tokoh adat Isenebuay, dan WWF
Sinkronisasi program lintas sektoral	KLH Teluk Wondama dan KMB
Wisatawan harus melapor ke Dinas Pariwisata	Dinpar Teluk Wondama
Kawasan TNTC harus dilindungi	Dinpar TW dan pengusaha lokal
Pelatihan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi	Tokoh adat Isenebuay dan YALHIMO
Pelibatan swasta dalam pengelolaan wisata	Dinpar Teluk Wondama
Tidak perlu ada SIMAKSI bagi nelayan yang sudah diberikan SIUP dan SIPI	DKP Teluk Wondama dan pengusaha luar
Pemekaran kampung	Kampung Yopanggar
Zona inti di"sasi"	Kampung Yende, Kampung Waparak, dan Distrik Roswar
Pemberian hukuman kepada pelanggar zonasi (agar jera)	Kampung Yende, Kampung Waparak, dan YALHIMO
TNTC dikembangkan sebagai kawasan perikanan berbasis wisata	DKP Papua Barat
Bentuk tenaga sukarelawan	Konsorsium Mitra Bahari (KMB)

diakomodir dalam zonasi yang telah ditetapkan.

Dalam pohon konflik pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama, masalah inti adalah perebutan ruang dan sumber daya alam (disimbolkan sebagai batang pohon konflik) dan efek yang muncul sebagai akibat masalah inti adalah degradasi kawasan TNTC dan ketidakpastian usaha (disimbolkan sebagai ranting). Adapun penyebab awal adalah bahwa TNTC adalah *state property* yang *open access* dan lemahnya kelembagaan TNTC (disimbolkan sebagai akar pohon konflik). Lemahnya kelembagaan dalam pengelolaan dapat diidentifikasi berdasarkan:

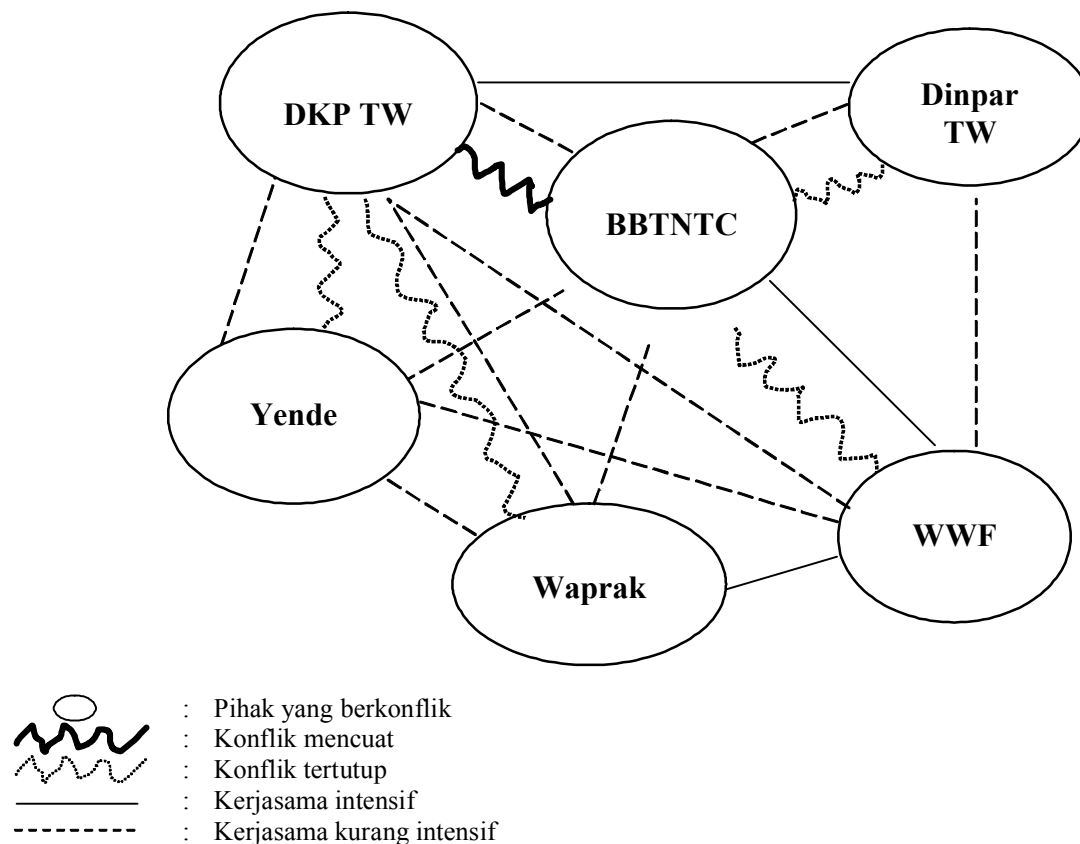
- 1 Tata batas yang dilakukan berupa titik referensi dan pada saat ini pal batas tersebut kondisinya sudah rusak. Semua titik referensi rusak/retak dan belum direhabilitasi. Pemasangan tanda batas masih pada kawasan perairan, sementara wilayah daratan belum ada temu gelang, hal ini sangat mempengaruhi keefektifan penegakan hukum (BBTNTC *et al.* 2009).
- 2 Pemasangan tanda batas zonasi di lapangan belum ada.
- 3 Sumber daya pengelola yang sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah personil BBTNTC sampai saat ini berjumlah 124 orang termasuk pegawai tidak tetap/harian. Jumlah ini tidak sebanding dengan luasnya kawasan TNTC yaitu $\pm 1.453.500$ ha. Jika dibagi habis dengan seluruh pegawai maka seorang pegawai wajib menjaga sekitar 11.721 ha. Kondisi sesungguhnya, tidak mungkin dibagi habis karena sebagian pegawai mengerjakan tugas administrasi di kantor sehingga luasan yang harus dijaga akan lebih luas.

- 4 Lokasi kantor BBTNTC di ibukota provinsi yang hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat udara jenis Twin Otter selama 45 menit atau naik kapal laut selama enam jam. Meskipun sudah ada Kantor Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Wasior yang berada di ibukota Kabupaten Teluk Wondama, tetapi sarana prasarana dan personil yang ada masih sangat kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

- 5 Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan juga kepada masyarakat. Ketika dilakukan wawancara mendalam dengan pihak Dinpar Provinsi Papua Barat, mereka masih menyebutkan BBTNTC sebagai yayasan pengelola TNTC. DKP Kabupaten Teluk Wondama juga menganggap BBTNTC sebagai saingan sehingga mereka berjuang untuk menerbitkan peraturan daerah tentang Zonasi KP3K sebagai tandingan Zonasi TNTC yang telah ditetapkan. Secara umum masyarakat sudah memahami keberadaan BBTNTC sebagai pengelola kawasan TNTC namun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum bisa membedakan antara BBTNTC dan WWF.

Berdasarkan sebab-sebab konflik, konsep resolusi konflik yang dapat ditempuh adalah:

- 1 Tata batas zona inti TNTC perlu segera dilaksanakan disertai dengan sosialisasi secara terus menerus.
- 2 Sumber daya manusia pengelola perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, khususnya sarpras dan personil Kantor BPTNW II Wasior.
- 3 Sosialisasi dan penyuluhan kepada pemda kemudian



DKP TW: DKP Teluk Wondama; Dinpar TW: Dinpar Teluk Wondama; BBTNTC: Balai Besar TNTC; Yende: Kampung Yende; Waparak: Kampung Waparak; WWF: WWF Teluk Cenderawasih.

Gambar 2 Peta konflik pengelolaan TNTC.

bersama-sama kepada masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus.

- 4 Konflik BBTNTC dengan DKP Teluk Wondama diselesaikan dengan cara negosiasi dan persamaan persepsi tentang pengelolaan TNTC di Kabupaten Teluk Wondama. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian, meningkatkan koordinasi, sinergitas program, dan kolaborasi manajemen.
- 5 Konflik BBTNTC dengan Dinpar TW dapat ditangani secara efektif dengan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan TNTC dan intervensi dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan pariwisata di Kabupaten Teluk Wondama. Selanjutnya membangun kolaborasi manajemen.
- 6 Konflik BBTNTC dengan WWF dapat ditangani dengan penetapan *MoU* antara BBTNTC dan WWF pada tingkat lokal sebagai dasar bagi pihak WWF Indonesia Site Teluk Wondama untuk menyampaikan laporan tertulis secara rutin kepada pihak BBTNTC. Selanjutnya bersama-sama

membangun sinergitas program dan kolaborasi manajemen dengan pemda dan masyarakat.

- 7 Konflik *latent* antara DKP TW dan Kampung Waparak, serta DKP TW dan Kampung Yende juga tidak perlu diabaikan. Konflik ini perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif. Peningkatan komunikasi dengan masyarakat perlu dilakukan terkait dengan pemberian SIUP dan SIPI di wilayah Kampung Waparak dan Kampung Yende. Kemungkinan konflik *latent* juga terjadi di kampung-kampung lainnya di dalam kawasan TNTC.

Konsep resolusi konflik di atas bersifat parsial pada skala mikro hasil penelitian. Dengan demikian, konsep resolusi konflik yang dapat diakomodir oleh semua *stakeholders* secara makro adalah pendekatan kolaborasi manajemen. Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk lembaga kolaborasi yang terdiri atas *advisory body* (yang meliputi BAPPEDA, KLH, para kepala distrik, para tokoh adat, para kepala kampung, LSM, para pengusaha, dan *stakeholders* lainnya) dan *manajemen body* (yang meliputi BBTNTC, DKP, dan Dinpar). Keanggotaan *advisory body* bisa bertambah sesuai kebutuhan dan aspirasi yang ada.

Lembaga kolaborasi dijalankan oleh sekretariat forum kolaborasi yang bertugas untuk menghubungkan *management body* dan *advisory body*. Peran sekretariat sangat sentral. Sekretariat harus proaktif dalam mengidentifikasi isu-isu yang sedang berkembang yang dilakukan oleh *management body* dalam bentuk program kerja atau kegiatan. Sekretariat forum kolaborasi direkrut dari orang-orang yang independen, bukan salah satu anggota dari *management body* maupun *advisory body*. Sekretariat memfasilitasi rapat-rapat, memberikan pelayanan administrasi, mempersiapkan bahan-bahan koordinasi, mendistribusikan, dan mempublikasikan hasil-hasil kesepakatan kepada para pihak yang berkepentingan. Biaya operasional sekretariat forum kolaborasi dapat diperoleh dari *management body*, *advisory body*, dan sumber-sumber lainnya yang sah.

Model kolaborasi yang sebaiknya dikembangkan adalah “kontrol bersama” yang dimulai dari proses-proses negosiasi (melibatkan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan) dan pengembangan kesepakatan (Borrini 1996). Mekanisme dan protokol negosiasi harus dibangun terlebih dahulu. Model mekanisme dan protokol negosiasi yang dapat dilaksanakan di lokasi penelitian:

- 1 Menekankan pada kepentingan dan kebutuhan, bukan pada posisi dan fakta.
- 2 Lebih bersifat persuasif daripada pertentangan.
- 3 Komitmen pada kesepakatan bersama daripada penyelesaian sengketa.
- 4 Komunikasi yang konstruktif untuk mengembangkan pemahaman bersama daripada kritik-kritik negatif serta memperkuat argumen masing-masing pihak.
- 5 Tercapainya penyelesaian sengketa yang berjangka panjang karena masing-masing pihak mempunyai komitmen bersama.
- 6 Penggunaan dan tukar menukar informasi yang konstruktif.
- 7 Fleksibilitas yang tinggi.

Tabel 4 Analisis terhadap *rights*, *responsibility*, dan *return* para *stakeholders*

<i>Stakeholders</i>	<i>Rights</i>	<i>Responsibility</i>	<i>Returns</i>
BBTNTC	Pemberian SIMAKSI	Menyampaikan tembusan SIMAKSI kepada instansi terkait	Setiap orang yang beraktivitas di dalam kawasan dapat dimonitor dengan baik
DKP Kabupaten	Pemberian Izin Usaha Perikanan	Memberikan izin berdasarkan kuota yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan lokasinya di luar zona inti taman nasional yang dilampiri dengan peta zonasi TNTC	Pemanfaatan potensi laut tidak masuk pada zona inti dan tidak melampaui daya dukung kawasan.
		Menyampaikan tembusan SIUP kepada instansi terkait	Perizinan yang dikeluarkan dapat diawasi bersama pihak lain
Dinpar Kabupaten	Pemberian Izin Usaha Pariwisata	Memberikan Izin Usaha Pariwisata hanya pada zona pariwisata	Kegiatan pariwisata tidak masuk pada zona inti TNTC
		Menyampaikan tembusan Surat Izin Usaha Pariwisata kepada instansi terkait	Memberikan PAD dari sektor pariwisata

Kolaborasi diarahkan pada pembagian kekuasaan dan tanggungjawab secara formal kepada *management body*. Pengelolaan TNTC secara kolaborasi tidak lagi bertumpu pada satu pemangku kepentingan tetapi menyebar dalam kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang telah dapat mengatur dirinya sendiri menurut wewenang, peran dan fungsi, serta tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan di lapangan merupakan proses alami tanpa ada unsur paksaan. Prakondisi yang perlu dilakukan agar proses alami dapat berlangsung adalah negosiasi kepentingan dengan *stakeholders* yang berada pada posisi *key stakeholders* dan pada posisi *subject*. Tahapan proses menuju kolaborasi dimulai dari penguatan kelembagaan BBTNTC, konsolidasi BBTNTC bersama lembaga non pemerintah (WWF) dan pemerintah daerah (DKP Teluk Wondama dan Dinpar Teluk Wondama), dan selanjutnya membangun kolaborasi bersama-sama masyarakat lokal dan *stakeholders* lainnya. Analisis terhadap *rights*, *responsibility*, dan *returns* disajikan pada Tabel 4.

Kesimpulan

Konsep resolusi konflik pengelolaan TNTC adalah pendekatan kolaborasi manajemen. Model kolaborasi yang dikembangkan adalah “kontrol bersama” yang dimulai dari proses-proses negosiasi dan pengembangan kesepakatan, kemudian diarahkan pada pembagian kekuasaan dan tanggungjawab secara formal. Lembaga kolaborasi dijalankan oleh sekretariat forum kolaborasi yang bertugas untuk menghubungkan *management body* dan *advisory body*. Tahapan proses menuju kolaborasi dimulai dari penguatan kelembagaan BBTNTC, konsolidasi BBTNTC bersama lembaga non pemerintah (WWF) dan pemerintah daerah (DKP Teluk Wondama dan Dinpar Teluk Wondama), dan selanjutnya membangun kolaborasi bersama-sama masyarakat lokal dan *stakeholders* lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Direktur Marine WWF Indonesia, Henry Silka Innah, dan semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- Adiwibowo S, Shohibuddin M, Savitri LA, Sjaf S, Yusuf M. 2009. Analisis Isu Permukiman di Tiga Taman Nasional di Indonesia. Bogor: SAINS Sajogyo Institute.
- [BBTNTC] Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 2008. Statistik Balai Besar TNTC Tahun 2007. Manokwari: Balai Besar TNTC.
- [BBTNTC] Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Pemda Kab Nabire, Pemda Kab. Teluk Wondama, WWF, Yalhimo. 2009. Buku Data dan Analisa Zonasi Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Manokwari: Balai Besar TNTC.
- Borrini-Feyerabend G. 1996. *Collaborative Management of Protected Areas: Tailoring the Approach to the Context*. Issues in Social Policy. Gland. Switzerland: IUCN.
- Faisal, Maskanah S. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Di dalam: Suporahardjo, editor. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Bogor: Pustaka LATIN.
- Fisher S *et al.* 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Kartikasari SN *et al.*, penerjemah. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra. Terjemahan dari: *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*.
- Huntington HP. 1998. Observations on the utility of the semi-directive interview for documenting traditional ecological knowledge. *Artic* 51(3):237–242.
- Reed MS *et al.* 2009. Who's in and why? A typologi of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management* 30:1–17.
- Mitchell B. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Setiawan B, Rahmi DH, penerjemah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan dari: *Resource and Environmental Management*.
- Wiratno, Indriyo D, Syarifudin A, Kartikasari A. 2004. Berkaca di Cermin Retak. Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. Edisi Kedua (edisi revisi). Jakarta: FOReST Press, *The Gibbon Foundation* Indonesia, Departemen Kehutanan, PILI-NGO Movement.